DIRJEN BINA PEMDES INGATKAN

Penting, Penetapan Batas Desa

JAKARTA (KR) - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengingatkan para pemangku kepentingan terkait pentingnya penetapan batas desa.

Menurut Eko, para pemangku kepentingan terkait seperti Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu segera menetapkan batas desa menggunakan Dana Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjadi lebih optimal.

"Bagaimana Dana Desa bisa digunakan untuk penetapan batas desa. Kalau tidak dilaksanakan, kita tidak punya batas desa sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak optimal," kata Eko Prasetyanto di Jakarta, Senin (17/7).

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam rangka Penataan Kewenangan Desa dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk Kualitas Belanja Desa.

Saat ini, menurut Eko, telah ada kemajuan dalam pembahasan antara Kemendagri, Bappenas, Kemendes PDTT, dan Kemenkeu mengenai penggunaan Dana Desa untuk penetapan batas desa.

Eko mengingatkan Ditjen Bina Pemdes mengenai pentingnya mempermudah penyampaian materi pelatihan kepada para peserta pelatihan aparatur desa. Salah satu komponen terpenting dalam penyelenggaraan pelatihan adalah tersedianya tenaga pengajar yang memiliki kompetensi memadai agar mampu menyampaikan informasi serta membimbing peserta ToT dengan baik.

Menurut Eko, program pelatihan ini akan diikuti setiap desa dengan mengirimkan empat orang yang terdiri kepala desa dan aparatur desa. Kegiatan pelatihan aparatur desa merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program tersebut merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. **(Ant/San)-d**

JIKA KRISIS IKLIM TAK DITANGANI

Banyak Kota Terancam Hilang

JAKARTA (KR) - Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Mochamad Saleh Nugrahadi mengatakan, banyak kota terancam hilang jika krisis iklim tidak ditangani dengan baik.

"Kalau kita tidak atasi (krisis iklim), tentunya banyak kota kita yang akan hilang," kata Saleh saat bertemu media di Jakarta, Senin (17/7).

Hilangnya kota-kota tersebut, menurut Saleh, disebabkan karena krisis iklim membuat permukaan tanah semakin turun sementara permukaan air laut semakin naik. Kondisi ini, telah terjadi di Pantai Utara Pulau Jawa.

"Yang sekarang terjadi di Pantai Utara Pulau Jawa, bagaimana di kota-kota pesisir, garis pantai semakin mendekat. Kenapa mendekat? Karena banyak hal, entah itu abrasi atau memang tanahnya turun sementara air lautnya naik," ujar Saleh.

Saleh mengatakan, kondisi tersebut tentu akan diikuti oleh dampak yang tak diinginkan lainnya misalnya semakin berkurangnya ruang hidup. "Di Indonesia, kita kan negara kepulauan dan kebetulan memang kota-kota yang padat itu berada di pesisir. Dampaknya, tentunya dengan banyak pulau yang hilang, otomatis habitat hilang, ruang hidup makin berkurang," imbuhnya.

Selain kota atau pulau yang terancam hilang, Saleh mengatakan, krisis iklim juga dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, perubahan suhu, curah hujan, dan kelembaban akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan nyamuk Anopheles yang merupakan penyebar penyakit malaria. "Kemudian kalau kemarau berkepanjangan juga jadi banyak debut, bisa menyebabkan penyakit ISPA," tutur Saleh.

Di samping itu, Saleh menambahkan krisis iklim juga akan membawa dampak buruk pada ketersediaan air, pangan, hingga keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, pemerintah melakukan berbagai upaya termasuk membuat regulasi dalam rangka mengendalikan perubahan iklim dan memastikan regulasi tersebut terimplementasi dengan baik di semua lini. "Selain itu, kita juga melakukan monitoring dan evaluasi, (regulasi) ini jalan semua atau tidak. Ini memang sesuatu yang tidak mudah karena menyangkut banyak pihak," ujar Saleh Nugrahadi. **(Ant/San)-d**

UMY Sambungan hal 1

Kasus pembunuhan dengan cara korban dimutilasi mengundang keprihatinan Sosiolog Kriminalitas (Dosen Purna UGM) Dr Soeprapto SU. Kepada *KR* ia menyebutkan, hal itu menandakan, banyak orang yang melakukan tindakan tanpa dipikirkan terlebih dulu secara matang.

Selain itu, juga menandakan banyak orang tidak mempunyai kemampuan mengendalikan diri terhadap masalah yang dihadapi atau kecerdasan emosionalnya (*emotional quotient*) rendah. Akibatnya, melakukan tindakan melawan hukum. Kemudian setelah melakukan kejahatan itu (pembunuhan), pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Akhirnya pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara tubuh korban dimutilasi," terangnya.

Menurut Soeprapto, melihat kasus mutilasi itu, di mana antara pelaku dan korban memiliki hubungan pertemanan, Soeprapto menyarankan, agar selalu waspada dalam pertemanan, karena tidak selamanya teman itu baik. "Kita perlu mempelajari karakter teman dan mengetahui kebiasaannya. Ada sifat laten yang tersembunyi dalam diri seseorang, seperti bipolar yang kadang-kadang berperilaku baik, terkadang juga jelek atau reaksi/respons berlebihan terhadap suatu masalah," jelasnya.

Soeprapto juga menangkap kontrol dari masyarakat semakin melemah, karena kesibukan individu-individunya yang beragam, menyebabkan rasa peduli terhadap lingkungan berkurang. Harusnya, masyarakat punya satu sistem kontrol yang rutin dan jelas. "Rumusnya, kalau ada niat jahat ditambah ada kesempatan, maka terjadilah kejahatan. Kalaupun ada niat jahat, tapi kesempatan itu bisa diminimalkan oleh sebuah kontrol yang baik dari masyarakat, kejahatan bisa ditekan," tambahnya.

Menghindari fenomena mutilasi, menurutnya, perlu penyelesaian sistemik, tidak hanya kepolisian dan pemerintah, tapi juga membutuhkan kepekaan masyarakat terhadap segala fenomena yang terjadi di lingkungannya. Selain itu, masyarakat juga harus berani menegur atau melaporkan ke pihak berwajib. **(Fsy/Dev)-d**

Kridо Sambungan hal 1

menjadi 16.215 meter persegi. Namun tersangka KS membiarkannya, padahal seharusnya tersangka KS melakukan fasilitasi dalam menjalankan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan kadipaten sesuai dengan fungsinya.

Usai ditetapkan tersangka, KS langsung dibawa menuju rumah tahanan DIY. Saat dimintai komentar oleh wartawan, tersangka KS memilih untuk diam dan tidak berkomentar saat meninggalkan kantor Kejati DIY.

Terpisah, ketika dimintai tanggapan soal Kepala Dispertaru DIY yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mafia TKD, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono mengaku menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan meminta kepada yang bersangkutan KS (Krido) kooperatif dan memberikan keterangan apa adanya dalam proses hukum. Saat itu tersangka KS sempat menyampaikan bahwa diundang (diminta) datang ke Kejati DIY.

"Saya minta Mas Krido (KS) untuk mengikuti proses hukum dan menghormati keputusan hukum. Sehingga harus kooperatif dan hal itu sudah saya beritahu beberapa hari lalu, saat menghadap saya untuk memberitahukan bahwa hari ini akan diundang oleh Kejaksaan," terang Beny.

Beny meminta KS untuk kooperatif dalam menjalankan proses hukum serta apa adanya dalam memberikan keterangan sesuai apa yang diketahui. "Waktu itu belum ada status apapun, kalau sekarang kan sudah jelas ditetapkan," ujarnya.

Saat diminta tanggapan soal status tersangka KS sebagai Kepala Dispertaru DIY, Beny masih menunggu surat resmi dari Kejati DIY terkait penetapan status tersebut. Nantinya surat tersebut akan menjadi dasar untuk pengangkatan pejabat yang akan menggantikan tugas KS sebagai Kepala Dispertaru DIY

"Dalam waktu dekat, kalau suratnya sudah tersampaikan ke Gubernur, kami akan menindaklanjuti secara operasional tentang kepegawaian. Mungkin perlu pengangkatan pejabat pelaksana tugas sambil menunggu kepastian hukum berproses," tutup Beny. **(Ria/Sni)-d**

Penduduk Sambungan hal 1

Kesempatan Tanpa Batas: Pentingnya Hak dan Pilihan).

Sekali lagi angka 8 miliar penduduk menjadi peluang dan tantangan yang pelik. Tidak saja secara global tapi juga nasional dan lokal. Setidaknya migrasi dan arus mudik - balik setiap tahun menjadi isu yang harus dikaji. Dengan harapan otda yang sudah 27 seharusnya tahun bisa mereduksi migrasi tahunan.

Betapa tidak? Angka 8 miliar penduduk pastinya membutuhkan segala macam kebutuhan untuk hidup dan kehidupan. Karenanya, politisasi kependudukan tidak perlu diperpanjang termasuk misal persoalan kemiskinan untuk mendulang suara kemenangan di pesta demokrasi, baik pilkada atau pilpres. Jadi, kasus di sejumlah negara yang terjadi penyusutan kelahiran sementara di sisi lain ada juga sejumlah negara yang berlebihan di angka kelahiran menjadi fenomena yang memicu dualisme.

Ironisnya, ancaman terhadap angka 8 miliar penduduk tetap menjadi isu ironi di tengah semangat pembangunan. Karena itu, isu gender ketika jumlah perempuan lebih banyak dibanding pria, secara tidak langsung juga menjadi ancaman dibalik regenerasi dan keberlanjutan hidup.

Jika dicermati, isu kependudukan terkait World Populatuon Day (WPD) yang diperingati setiap 11 Juli, tidak hanya angka 8 miliar tapi fertilitas dan stunting sehingga berdampak sistemik terhadap regenerasi dan keberlanjutan hidup dan kehidupan manusia. Sehingga eksploitasi, eksplorasi dan politisasi penduduk dengan semua persoalan tentang kemiskinan dan pengangguran menjadi sangat tidak logis† jika dikaitkan kepentingan peningkatan kesejahteraan. Jadi peningkatan keluarga berkualitas menjadi sasaran strategi untuk menepis keraguan dibalik ancaman 8 miliar penduduk di dunia. Artinya isu penduduk 8 miliar tidak hanya menjadi sensitif di negara miskin - berkembang tapi juga di negara industri - maju karena berkepentingan terhadap pemenuhan kebutuhan - keinginan, termasuk perumahan, permukiman dan pangan.

Belajar bijak dari ancaman penduduk 8 miliar maka persepsian tentang bonus demografi sepertinya harus dipikir ulang, karena faktanya justru menjadi persoalan yang serius. Hal ini memberikan gambaran bahwa kependudukan memang bukan sekadar kuantitas yang banyak tapi juga penting untuk memikirkan kualitas. Apalagi kecerdasan buatan sekarang semakin cerdas dan semakin mendekati manusia secara riil.

Karena itu, tidak perlu mencari kambing hitam dibalik ledakan penduduk yang mencapai 8 miliar. Tetapi urgensi dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut harus dicermati agar tidak kemudian justru memicu konflik sosial sebagai dampak dari ledakan jumlah penduduk. Jadi, realita pergeseran dari peran SDA ke SDM dan era now Sumber Daya Robotik - SDR haruslah menjadi pembelajaran bahwa kependudukan yang mencapai 8 miliar tidak bisa menjadi rahmat secara umum tapi juga ada tantangan dan ancaman konflik sosial.

Jika tidak bijak dalam menyikapi realitas ini maka harapan pembangunan untuk kesejahteraan tidak bisa tercapai. Apalagi pemerataan juga semakin sulit karena terkonsentrasi di perkotaan.

(Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta)-d

BERDASARKAN ISU GLOBAL DAN SAINS

Labelisasi BPA Galon Guna Ulang

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito menyatakan, kebijakan labelisasi bahaya Bisphenol A (BPA) pada galon guna ulang berbahan polikarbonat didasari atas isu global serta penelitian secara saintifik.

"Ada penelitian yang mendukung dan kami percaya pada latar belakang sains tersebut. Harus diaplikasikan dalam regulasi," kata Penny K Lukito dalam konferensi pers Hari Lingkungan Sedunia 2023 di Jakarta, Senin (17/7).

Wacana labelisasi BPA yang berproses sejak 2018, kata Penny, masih disangsikan sejumlah kalangan pengusaha yang mempertanyakan fakta konsumen yang meninggal maupun yang sakit akibat paparan BPA.

Penny mengatakan, seharusnya mereka yang ragu dengan aturan itu mau belajar dari peristiwa Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang memicu korban jiwa pada anak akibat kontaminasi Etilen Glikol/Dietilen Glikol (EG/DEG) yang melampaui ambang batas aman pada produk obat sirup. "Harusnya kita belajar, sudah pintar, dikaitkan EG dan DEG, bahwa risiko produk mengandung kontaminan itu ada. Kita tidak perlu tunggu yang meninggal atau sakit," ujarnya.

Labelisasi BPA, kata Penny, masih sangat wajar, sebab tidak sampai menerapkan larangan terhadap penggunaan kemasan air minum yang dipakai secara berulang. "Kebijakan BPOM sangat soft untuk mengedukasi masyarakat. Tidak sampai melarang penggunaan kemasan air yang dipakai berulang. Tapi masih ada industri yang masih menolak," katanya.

Penny berharap kebijakan labelisasi BPA dapat menciptakan kompetisi sehat melalui inovasi kemasan air minum yang aman dan bermutu, sehingga konsumen dapat teredukasi dan cerdas memilih produk. "Masyarakat akan memilih produk yang aman, akhirnya produk yang tidak ramah lingkungan dengan sendirinya akan tersingkirkan karena ada kompetisi inovasi," katanya.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan BPOM Rita Endang mengatakan, bahaya BPA galon guna ulang ada pada jenis plastik keras atau polikarbonat yang pembuatannya menggunakan BPA. Alasan rancangan regulasi pelabelan BPA menyasar produk galon guna ulang yang saat ini digunakan sehari-hari oleh sekitar 50 juta lebih warga Indonesia.

Dari total 21 miliar liter produksi industri air kemasan pertahunnya, kata Rita, sekitar 22 persen di antaranya beredar dalam bentuk galon guna ulang. **(Ant/San)-d**

Bencana di Indonesia Dipengaruhi Cuaca Regional

JAKARTA (KR) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, bencana hidrometeorologi basah maupun kering yang terjadi di Indonesia masih dipengaruhi oleh cuaca yang bersifat regional.

"Indonesia itu tidak bisa ketika musim kemarau waspada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saja, atau saat hujan waspada banjir saja, karena kondisi kita sangat bergantung pada cuaca yang sangat regional," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam Diskusi Disaster Briefing di Jakarta, Senin (17/7).

Abdul menjelaskan, Indonesia sebagai negara maritim dipengaruhi oleh lautan Pasifik-Hindia, sehingga menyebabkan pola musim yang bisa berbeda, ketika kemarau tidak semua wilayah kering, begitu pula saat hujan tidak semua wilayah basah.

"Dalam dua minggu ini, kita masih dominan di bencana hidrometeorologi basah meskipun sudah memasuki musim kemarau. Di tanggal 10-16 Juli 2023 ada 18 kali banjir, karhutla ada tujuh kejadian, meskipun intensitas hujan naik, di beberapa tempat kekeringan dan karhutla masih terjadi," ujar Abdul Muhari.

Ia menegaskan, dalam kondisi-kondisi seperti ini, masyarakat harus memahami bahwa Indonesia bisa saja mengalami banjir di musim kemarau, atau karhutla di musim hujan. "Itu fenomena yang sangat biasa, jadi selalu kita tekankan di daerah, tidak bisa meningkatkan kewaspadaan hanya di satu atau dua jenis bencana saja," lanjutnya.

Abdul Muhari memaparkan, banjir masih melanda beberapa wilayah, di Pulau Sumatera tepatnya di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Kota Padang, Pesisir Selatan, Bangka, dan Bangka Tengah. Sedangkan di Kalimantan yakni Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Indonesia Timur juga cukup terdampak banjir, di antaranya Bolaang Mongondow, Sinjai, Kolaka Timur, Seram bagian Barat, Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan.

Namun, di Pulau Jawa bencana yang mendominasi justru kebakaran lahan dan kekeringan, yakni di Bogor, Sukabumi, Cirebon, Cilacap, Klaten, Blora, Pati, dan Situbondo. "Meskipun di Pulau Jawa didominasi oleh bencana karhutla dan kekeringan, beberapa wilayah lain justru didominasi banjir, karena fenomena regional itu bisa membawa atau menarik awan hujan, sehingga dinamika cuaca di Indonesia sangat dinamis," tuturnya. **(Ant/San)-d**

Jemaah Sambungan hal 1

Khusus untuk jemaah yang diwakilkan atau dibadalkan dalam melaksanakan wukuf atau seluruh rukun haji karena wafat atau sakit keras, mereka diberikan dua sertifikat. Keduanya, yakni sertifikat haji dan sertifikat badal haji.

Dikatakan Arsad, kebijakan penerbitan sertifikat haji merupakan bentuk perhatian pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada jemaah haji Indonesia yang berangkat di 2023.

Berdasarkan catatan Kementerian Agama, total ada 209.782 jemaah haji reguler Indonesia yang tiba di Tanah Suci tahun ini (99,57%). Sebanyak 98,34% belum berhaji, hanya 1,66% jemaah yang sudah pernah menjalankan ibadah haji. **(Ati)-d**

Presiden Sambungan hal 1

Karena itu, ia meminta proyek BTS tersebut jangan sampai terbengkalai. "Jangan sampai sudah peristiwa hukum, BTS terbengkalai, ini yang saya tidak mau, tugas beratnya di situ," kata Jokowi.

Selain melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo, Presiden juga melantik lima wakil menteri (wamen) untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024. Kelima wamen tersebut yakni Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDT), Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN), dan Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag).

Selain wamen, Presiden juga menyebut akan membentuk satuan tugas untuk mempercepat penyelesaian proyek penyediaan infrastruktur BTS. "Dan juga akan kita bantu lagi selain wamen, satgas. Ini waktunya sangat mepet sekali, ada satgasnya nanti," tambah Jokowi.

Jokowi mengaku menunjuk Nezar Patria karena memiliki rekam jejak yang mumpuni. Nezar Patria diketahui pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pers dan pernah bekerja di BUMN, dan lain-lain. "Nizar ini kan multimedia pernah di Jakpost, pernah di Dewan Pers, pernah di BUMN. Saya kira akan sangat membantu sekali Pak Menteri Budi Arie," jelasnya.

Mengenai penunjukan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Saiful Rahmat menjadi Wamenag untuk menggantikan Zainut Tauhid, karena pertimbangan dari partai. "Itu ada permintaan dari partai," kata Presiden.

Zainut Tauhid dan Saiful Rahmat merupakan figur yang sama-sama berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan, pergantian Zainut merupakan rotasi biasa dan sebuah keniscayaan. "Tidak ada copot-mencopot ya, jadi kalau dalam jabatan kemudian rolling apa itu, sudah menjadi keniscayaan ya dalam kehidupan ini semua memang tak ada yang abadi," kata Mardiono.

Menurut Mardiono, sebagai pimpinan partai koalisi Pemerintah dan juga menjabat Utusan Khusus Presiden, dirinya berkewajiban untuk membantu Presiden Jokowi dalam mengharmonisasi setiap kebijakan Presiden di masa sisa pemerintahan periode 2019-2024.

"Karena dua-duanya itu beliau kader PPP dan tentu PPP memiliki kader banyak ya tentu kewenangan terakhir ada pada Bapak Presiden karena itu memang hak prerogratif Bapak Presiden," kata Mardiono. **(Sim/Ant)-d**

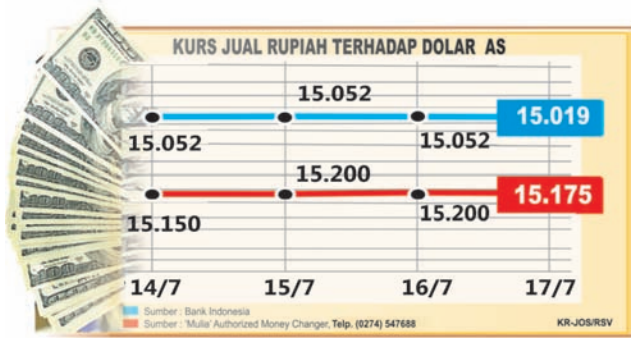

Prakiraan Cuaca — Selasa, 18 Juli 2023

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko